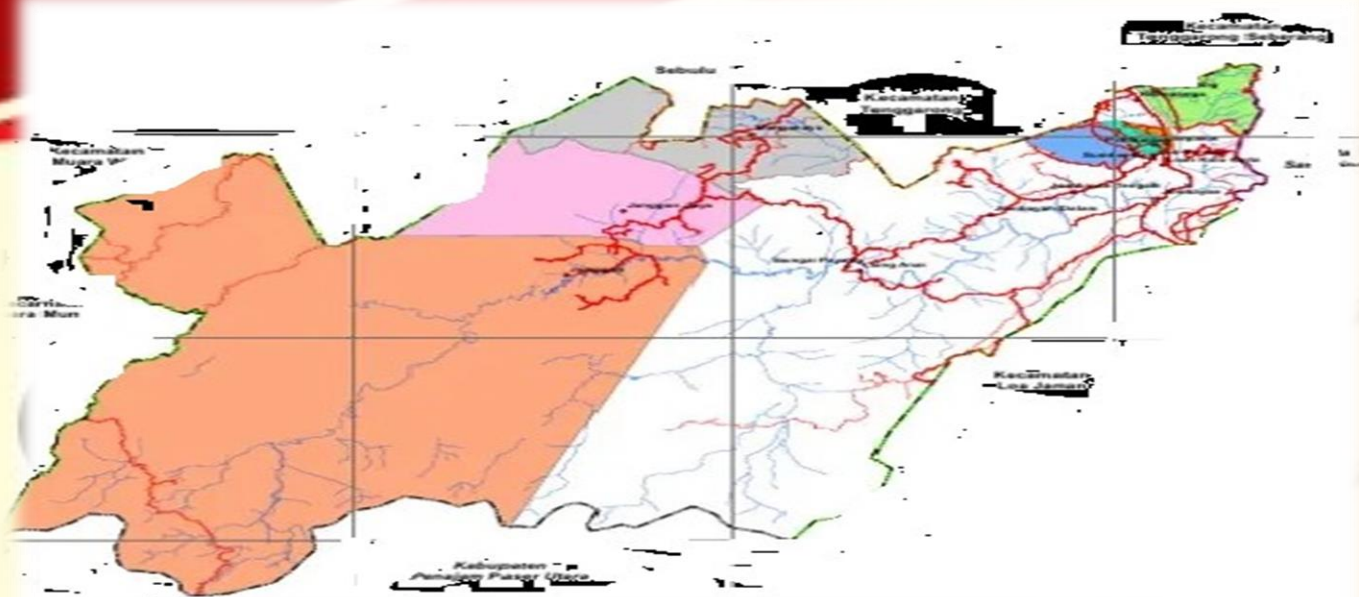




**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU**

**RENCANA KERJA AKHIR
TAHUN 2024**



KECAMATAN LOA KUKU

BAB I. PENDAHULUAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Kepada ALLAH Subhanallahu Wata,ala Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain.

Rancangan Rencana Kerja Akhir Tahun 2024 SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Loa Kulu dalam membina, melayani, serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang Mandiri, Sejahtera juga untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya. Diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD serta Pelayanan Kepada Masyarakat .

Rancangan Rencana Kerja Akhhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Loa Kulu untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Adapun keberhasilan dan tidaknya Rancangan Rencana Kerja Akhhir SKPD Tahun 2024 ini, tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Loa Kulu yang nantinya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Loa Kulu.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu masih banyak kekuranga-kekurangannya, oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya yang terkait serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Loa Kulu di masa yang akan datang.

Loa Kulu, 2 Agustus 2023

Camat



H. ADRIANSYAH.SH

Pembina

NIP. 196810061989031006

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1 s/d 2
1.1 Latar Belakang	1 s/d 2
1.2 Landasan Hukum	3 s/d 4
Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	6 s/d 7
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I s/d II Tahun 2023.....	8 s/d 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14 s/d 19
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.....	20 s/d 21
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22 s/d 29
2.5 Penelaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten	30 s/d 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36 s/d 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38 s/d 57
BAB V PENUTUP.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diamanatkan serta Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2020-2024 serta keberhasilan (*succes story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada priode sebelumnya.

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep Membangun Kabupaten dari Kecamatan yakni satu pendekatan baru yang merupakan terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing stakeholder yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan

7. dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Nomor: 22 Tahun 2023
15. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 247/SK-BUP/HK/2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
16. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Kulu selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Loa Kulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kutai Kartanegara,

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Loa Kulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

- b. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan Renja PD (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian 2023 Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja-PD Tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1					Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah Daerah									
1	0.1				Bidang Urusan Pemerintah Kecamatan Loa Kulu									
1	0.1	0.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	41.027.293.275	9.308.022.702	8.904.910.268	0	0%	8.423.170.372	18.212.932.970	44%
1	0.1	0.1	0.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	864.639.715	31.867.000	0	0	0%	37.027.500	68.894.500	8%
1	0.1	0.1	0.1	0.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55.000.000	6.190.000	0	0	0%	6.231.500	12.421.500	23%
1	0.1	0.1	0.1	0.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	20.000.000	0	0	0	0%	5.000.000	5.000.000	25%
1	0.1	0.1	0.1	0.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	50.000.000	4.474.000	0	0	0%	4.500.000	8.974.000	18%
1	0.1	0.1	0.1	0.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50.000.000	5.356.000	0	0	0%	5.396.000	10.752.000	22%
1	0.1	0.1	0.1	0.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	50.000.000	5.900.000	0	0	0%	5.900.000	11.800.000	24%
1	0.1	0.1	0.1	0.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	509.639.715	4.980.000	0	0	0%	5.000.000	9.980.000	2%
1	0.1	0.1	0.1	0.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	4.967.000	0	0	0%	5.000.000	9.967.000	8%

1	0.1	0.1	0.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.937.161.560	6.851.376.888	6.976.711.888	6.973.001.888	100%	6.858.398.320	20.682.777.096	59%
1	0.1	0.1	0.2	0.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	34.587.161.560	6.746.636.888	6.746.636.888	6.746.636.888	100%	6.753.338.320	20.246.612.096	59%
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	100.000.000	0	0	0%	0	100.000.000	0%
1	0.1	0.1	0.2	0.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	4.740.000	230.075.000	226.365.000	98%	5.060.000	236.165.000	72%
1	0.1	0.1	0.2	0.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	300.000.000	0	0	0	0%	100.000.000	100.000.000	33%
1	0.1	0.1	0.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	370.000.000	404.750.000	0	0	0%	46.200.000	450.950.000	22%
1	0.1	0.1	0.3	0.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	160.000.000	400.000.000	0	0	0%	41.200.000	441.200.000	76%
1	0.1	0.1	0.3	0.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	210.000.000	4.750.000	0	0	0%	5.000.000	9.750.000	5%
1	0.1	0.1	0.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	0	3.200.000	135.190.000	133.650.000	99%	0	136.850.000	5%
1	0.1	0.1	0.4	0.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	3.200.000	135.190.000	133.650.000	99%	0	136.850.000	5%
1	0.1	0.1	0.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.535.000	203.786.540	238.830.200	236.392.100	99%	316.820.000	756.998.640	100%
1	0.1	0.1	0.5	0.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	12.500.000	2.485.000	0	0	0%	2.500.000	4.985.000	40%
1	0.1	0.1	0.5	0.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	100.000.000	44.126.140	143.072.000	140.844.000	98%	25.000.000	209.970.140	100%
1	0.1	0.1	0.5	0.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.5	0.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	224.000.000	59.123.500	78.795.900	78.586.800	100%	40.000.000	177.710.300	79%
1	0.1	0.1	0.5	0.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	25.000.000	11.999.900	16.962.300	16.961.300	100%	15.000.000	43.961.200	100%

1	0.1	0.1	0.5	0.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000	5.400.000	0	0	0%	5.500.000	10.900.000	38%
1	0.1	0.1	0.5	0.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100.000.000	10.172.000	0	0	0%	0	10.172.000	10%
1	0.1	0.1	0.5	0.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	126.535.000	67.530.000	0	0	0%	25.000.000	92.530.000	73%
1	0.1	0.1	0.5	0.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	130.000.000	2.950.000	0	0	0%	3.820.000	6.770.000	5%
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0%	200.000.000	200.000.000	5%
1	0.1	0.1	0.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.6	0.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.1	0.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2.933.957.000	1.011.611.274	891.596.180	842.719.099	95%	964.724.552	2.819.054.925	96%
1	0.1	0.1	0.7	0.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	10.000.000	1.989.000	0	0	0%	2.000.000	3.989.000	40%
1	0.1	0.1	0.7	0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	577.500.000	149.711.184	133.506.564	114.116.419	85,48%	115.000.000	378.827.603	66%
1	0.1	0.1	0.7	0.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.346.457.000	815.784.950	744.659.616	715.172.680	96%	832.724.552	2.363.682.182	100%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	44.126.140	13.430.000	13.430.000	100%	15.000.000	72.556.140	40%
1	0.1	0.1	0.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1.175.000.000	801.431.000	662.582.000	373.335.000	56%	200.000.000	1.374.766.000	100%
1	0.1	0.1	0.8	0.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	1.050.000.000	182.731.000	239.702.000	236.687.000	98,74%	200.000.000	619.418.000	59%

1	0.1	0.1	0.8	0.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	125.000.000	18.450.000	0	0	99,68%	0	18.450.000	15%
1	0.1	0.1	0.8	0.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	600.250.000	422.880.000	136.648.000	32%	0	736.898.000	59%
1	0.1	0.2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	72.445.000.000	28.937.989.022	38.002.193.461	36.002.680.354	95%	31.844.585.000.000	31.909.525.669.376	100%
						Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
						Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.2	0.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.2	0.1	0.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.2	0.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	620.000.000	9.185.662.082	0	0	0%	35.000.000	9.220.662.082	100%
1	0.1	0.2	0.2	0.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	120.000.000	4.762.005	0	0	0%	5.000.000	9.762.005	8%
1	0.1	0.2	0.2	0.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	500.000.000	96.751.100	0	0	0%	30.000.000	126.751.100	25%
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	9.084.148.977	0	0	0%	0	9.084.148.977	35%
1	0.1	0.2	0.3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	71.825.000.000	19.752.326.940	38.002.193.461	36.002.680.354	95%	31.844.550.000.000	31.900.305.007.294	100%
1	0.1	0.2	0.3	0.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	2.925.000	0	0	100%	0	2.925.000	8%

1	0.1	0.2	0.3	0.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.2	0.3	0.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	71.750.000.000	19.749.401.940	38.002.193.461	36.002.680.354	94,74%	31.844.550.000.000	31.900.302.082.294	100%
														#DIV/0!
1	0.1	0.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95.000.000	9.092.378.977	1.010.674.468	591.504.140	59%	40.000.000	9.723.883.117	100%
1	0.1	0.3	0.1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	95.000.000	9.092.378.977	1.010.674.468	591.504.140	59%	40.000.000	9.723.883.117	100%
1	0.1	0.3	0.1	0.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	75.000.000	8.230.000	87.390.600	65.208.000	75%	15.000.000	88.438.000	100%
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	9.084.148.977	923.283.868	526.296.140	57,00%	25.000.000	9.635.445.117	25%
1	0.1	0.3	0.1	0.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	0.1	0.3	0.1	0.3		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
1	0.1	0.4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	820.000.000	0	0	0	0%	130.194.291	130.194.291	16%

1	0.1	0.4	0.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	820.000.000	0	0	0	0%	130.194.291	130.194.291	16%
1	0.1	0.4	0.1	0.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	0	0	0	0%	0	0	0%
1	0.1	0.4	0.1	0.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	800.000.000	0	0	0	0%	130.194.291	130.194.291	16%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	800.000.000	0	0	0	0%	130.000.000	130.000.000	16%
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	800.000.000	0	0	0	0%	130.000.000	130.000.000	16%
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	800.000.000	0	0	0	0%	130.000.000	130.000.000	16%
1	0.1	0.5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90.000.000	56.780.000	0	0	0%	50.000.000	106.780.000	119%
1	0.1	0.5	0.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	90.000.000	28.390.000	0	0	0%	25.000.000	53.390.000	59%
1	0.1	0.5	0.1	0.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000	28.390.000	0	0	0%	25.000.000	53.390.000	59%
1	0.1	0.5	0.1	0.2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%
							23.047.458.655	31.301.096.343	41.563.881.489	38.798.839.693	93%	40.627.914.663	31.945.849.438.945	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Kulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Loa Kulu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat rakyat. tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKecamatan Loa Kulu
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Sakip Perangkat Daerah											
I	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			376.892.000	168.927.943	173.927.943	173.927.943	0	31.867.000	37.027.500	170.000.000	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0	6.190.000	6.231.500	20.000.000	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun			0	-	-	-	0	0	5.000.000	20.000.000	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	4.474.000	4.500.000	20.000.000	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5.356.000	5.396.000	20.000.000	
5	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5.900.000	5.900.000	20.000.000	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	93.927.943	103.927.943	103.927.943	0	4.980.000	5.000.000	20.000.000	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	4.967.000	5.000.000	50.000.000	
II	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.075.000	7.027.432.312	6.977.432.312	6.977.432.312	6.973.001.888	6.851.376.888	6.958.398.320	6.565.152.051	
1	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia			0	6.917.432.312	6.917.432.312	6.917.432.312	6.746.636.888	6.746.636.888	6.753.338.320	6.395.152.051	
2	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	-	
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			230.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	226.365.000	4.740.000	5.060.000	20.000.000	
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	100.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	100.000.000	150.000.000	
III	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	90.000.000	70.000.000	70.000.000	0	404.750.000		61.200.000	
1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			0	40.000.000	30.000.000	30.000.000	0	400.000.000	41.200.000	41.200.000	

2	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan		0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	4.750.000	5.000.000	20.000.000	
IV	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		135.190.000	0	0	0	133.650.000	3.200.000	-	200.000.000	
1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		135.190.000	0	0	0	133.650.000	3.200.000	0	200.000.000	
V	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		238.830.200	379.307.000	348.307.000	154.307.000	236.392.100	203.786.540	316.820.000	847.000.000	
	Jumlah Komponen Listrik (Unit)		0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.485.000	2.500.000	15.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		143.072.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.844.000	44.126.140	25.000.000	100.000.000	
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		78.795.900	40.000.000	40.000.000	46.000.000	78.586.800	59.123.500	40.000.000	100.000.000	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia		16.962.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.961.300	11.999.900	15.000.000	25.000.000	
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0	6.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.400.000	5.500.000	7.000.000	
	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	10.172.000	0	50.000.000	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara		0	25.307.000	25.307.000	25.307.000	0	67.530.000	25.000.000	200.000.000	
	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2.950.000	3.820.000	50.000.000	
	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	250.000.000	
VI	Jumlah Barang Milik Daerah		0	0	0	0	0	0		304.524.000	
	Jumlah Mebel yang diadakan		0	0	0	0	0	0	0	104.524.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara		0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	
	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan		0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	
	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi		0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
VII	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		893.596.180	586.791.400	586.791.400	586.791.400	844.719.099	1.011.611.274	947.724.552	1.057.724.552	

	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.989.000	2.000.000	5.000.000	
	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			133.506.564	115.500.000	115.500.000	115.500.000	114.116.419	149.711.184	115.000.000	185.000.000	
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			744.659.616	469.291.400	469.291.400	469.291.400	715.172.680	815.784.950	832.724.552	832.724.552	
	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.430.000	0	0	0	13.430.000	44.126.140	-	35.000.000	
VIII	Jumlah Barang Milik Daerah			687.582.000	315.000.000	215.000.000	215.000.000	373.335.000	801.431.000		644.000.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan			239.702.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	236.687.000	182.731.000	0	569.000.000	
	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	18.450.000	0	25.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			422.880.000	0	0	0	136.648.000	600.250.000	0	50.000.000	
IX	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan			3.005.135.866	0	0	0	36.002.680.354	28.937.989.022			
X	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif			0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
XIII	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	9.185.662.082	35.000.000	100.000.000	
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			0	0	0	0	0	4.762.005	0		
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	96.751.100	5.000.000	175,000,000	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	9.084.148.977	30.000.000	100.000.000	
XIV	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			2.905.135.866	20.299.960.000	31.859.550.000	14.325.000.000	36.002.680.354	19.752.326.940	31.844.550.000	15.773.409.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0	0	0	0	0	2.925.000	0	15.000.000	
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			2.905.135.866	20.284.960.000	31.844.550.000	14.310.000.000	36.002.680.354	19.749.401.940	31.844.550.000	15.743.409.000	
XIV	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9.092.378.977	15.000.000	650.000.000	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			87.390.600	15.000.000	15.000.000	15.000.000	65.208.000	8.230.000	15.000.000	25.000.000	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			923.283.868	5.000.000	5.000.000	5.000.000	526.296.140	9.084.148.977	0	300.000.000	
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	25.000.000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	
XV	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		50.000.000	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	

XVI	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	0	0	0	0	0			
XVII	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0		300.000.000	
XVIII	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000	
XIX	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	250.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28.390.000	25.000.000	150.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	
					27.434.683.130	23.047.458.655	23.412.458.655	38.798.839.693	30.489.093.696	40.627.914.663	27.398.009.603	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Loa Kulu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
 - a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
 - a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
 - b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
 - c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan

3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak- pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadilokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.Niaga Mas gemilang yang berlokasi di desa Jonggon dan PT Kota Bangun Play station yang berlokasi di Desa Sungai Payang Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah dan padi ladang di desa hampir disemua 15 Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2023 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini :

Tabel(nomor sesuai kebutuhan)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	8.222.628.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	8.222.628.603	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		37.027.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.231.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.396.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	5.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	20,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.958.398.320	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6.565.152.051	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	6.753.338.320	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	6.395.152.051	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	150.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		46.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		61.200.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	41.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	41.200.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		115.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	115.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		316.820.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		847.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	0	50.000.000	

			Tangga					Tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	40 Jenis	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	200.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	3.820.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	50.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	504.524.000	
	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	0	0	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	71	104.524.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	10	150.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	4	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	20	50.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	949.724.552	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1.057.724.552	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	185.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832.724.552	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832.724.552	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah		644.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	569.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0		
		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0		

		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	50.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		275.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	175.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	100.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		31.844.550.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		15.773.409.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	15.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	31.844.550.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	15.743.409.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		15.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		15.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		350.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	25.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	300.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	25.000.000	
		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		130.194.291	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		350.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	50.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	130.194.291	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	300.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	300.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	130.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	300.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	130.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	300.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	25.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	250.000.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	25.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	250.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	25.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	150.000.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	100.000.000	
					23.104.538.655						27.398.009.603

2.5. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara --sekalius untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan

Tabel.....(nomor sesuai kebutuhan)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		
'12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	
'13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	60 Stel	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	0	
25	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Set	
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	2 Unit	
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	1 Unit	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	1 Unit	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		

29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah		
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	
		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	
		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	
36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	15 Kegiatan	
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		
37	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15 Kegiatan	
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15 Kegiatan	
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15 Laporan	

41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	15 Laporan	
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	3 Lembaga	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	
		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	

15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Kebijakan Kabupaten

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

2 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;

3 Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional serta juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu telah sesuai dengan kebijakan Kabupaten yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2022 s/d 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2023, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat administrasi yang benar dan akurat
2. Terpenuhinya pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan profesional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Sasaran :

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Loa Kulu, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat pemakai jasa layanan Masyarakat
2. Terwujudnya kepuasan Masyarakat sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme.
4. Meningkatnya jasa layanan kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.

3.3 Terpenuhinya target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan Masyarakat

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pernerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel (nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Loa Kulu

lembar 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	7.222.088.603	APBD		100	7.645.178.394
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Loa Kulu	100	41.296.000	APBD		100	168.927.943
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Loa Kulu	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.396.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.900.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	2 Dokumen	5.000.000	APBD		2 Dokumen	103.927.943
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Kulu	100	5.532.572.051	APBD		100	6.455.152.051
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	Loa Kulu	1 Dokumen	6.395.152.051	APBD		1 Dokumen	6.395.152.051
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	5.060.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	132.360.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	51.200.000	APBD		100	70.000.000
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	41.200.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	Loa Kulu	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Loa Kulu	60 Stel	0	APBD		0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	305.296.000	APBD		100	149.307.000
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	Loa Kulu	1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	Loa Kulu	2 Unit	25.000.000	APBD		2 Unit	25.000.000
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	30 Jenis	0	APBD		30 Jenis	0
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Loa Kulu	35 Jenis	40.000.000	APBD		35 Jenis	46.000.000
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	Loa Kulu	2500 Lembar	14.516.000	APBD		2500 Lembar	5.000.000
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Kulu	720 Eksemplar	0	APBD		720 Eksemplar	5.500.000
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Loa Kulu	50 Kali	0	APBD		50 Kali	25.000.000
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	Loa Kulu	40 Kali	200.000.000	APBD		40 Kali	20.307.000
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	Loa Kulu	100 Dokumen	3.280.000	APBD		100 Dokumen	20.000.000
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	30 Kegiatan	20.000.000	APBD		30 Kegiatan	0
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0

25	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Loa Kulu	5 Set	0	APBD		5 Set	0
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	Loa Kulu	5 Unit	0	APBD		5 Unit	0
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	Loa Kulu	15 Unit	0	APBD		15 Unit	0
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Loa Kulu	100	1.041.724.552	APBD		100%	586.791.400
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	Loa Kulu	600 Lembar	2.000.000	APBD		600 Lembar	2.000.000
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Loa Kulu	72 Rekening	207.000.000	APBD		72 Rekening	115.500.000
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	361 Orang	832.724.552	APBD		361 Orang	469.291.400
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	20 Unit	0	APBD		0	0
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	250.000.000	APBD		100%	215.000.000
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	Loa Kulu	8 Unit	250.000.000	APBD		8 Unit	190.000.000
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	Loa Kulu	5 Unit	0	APBD		5 Unit	25.000.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Loa Kulu	100	10.757.296.000	APBD	100	100	14.445.000.000
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	15		APBD	15	100	0
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Loa Kulu	5		APBD	5	100	

11	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0
36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Loa Kulu	100	11.000.000	APBD		100	120.000.000
37	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	5.000.000	APBD		15 Kegiatan	20.000.000
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	6.000.000	APBD		15 Kegiatan	100.000.000
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	100	10.746.296.000	APBD		100	14.325.000.000
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	15 Kegiatan	5.000.000	APBD		15 Kegiatan	0
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	15 Kegiatan	891.296.000	APBD		15 Kegiatan	15.000.000
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Loa Kulu	12 kegiatan	9.850.000.000	APBD		170 kegiatan	14.310.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Loa Kulu	100	912.296.296	APBD		100	15.000.000
14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	100	912.295.295	APBD		100	15.000.000
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100 Orang	15.000.000	APBD		100 Orang	15.000.000
43	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	6.000.000	APBD		15 Kegiatan	0

44	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	0	891.296.000	APBD		0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	100		APBD		100	205.000.000
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Loa Kulu	100	0	APBD		100	205.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	5.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	0	APBD		2 Kegiatan	200.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	200.000.000
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	25.000.000	APBD		2 Kegiatan	200.000.000
45	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 kegiatan	25.000.000	APBD		2 kegiatan	200.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	10.000.000

17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100	25.000.000	APBD		100	10.000.000
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa	25.000.000	APBD		15 Desa	10.000.000
47	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa		APBD		0	0
					19.324.924.603				23.047.458.655

DAFTAR RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN LOA KULU
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

	Kegiatan Kuota Kecamatan		Loa Kulu	100	4.600.000.000	APBD			
1	Pembutan Badan Jalan Sebelah Pak. Parmin	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon Jaya	100 m	200.000.000	APBD		0	0
2	Pembuatan Badan Jalan tantai	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon Jaya	100 m	200.000.000	APBD		0	0
3	Pembersihan Bahu Jalan Loh Sumber ke Jembayan Dalam	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Loh Sumber	5000 m	200.000.000	APBD		0	0
4	Pembersihan Bahu Jalan Jonggon jaya ke Sungai Payang	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Sungai Payang	5000 m	200.000.000	APBD		0	0
5	Pemebersihan Bahu Jalan Margahayu ke Jonggon Desa	Panjang bahu jalan yang dirawat	Desa Jonggon	10.000 m	200.000.000	APBD		0	0
6	Lanjutan Pembangunan Taman Litarasi Kecamatan Loa Kulu	Luas Taman yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m2	200.000.000	APBD		0	0
7	Lanjutan Pembuatan Pagar TPS Kecamatan Loa Kulu	Panjang pagar yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD		0	0
8	Turap Pasangan Parit Depan TPS Kecamatan Loa Kulu	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD		0	0
9	Turap Pasangan Taman Literasi	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD		0	0
10	Turap Pasangan Parit Jl. Bayangkara Loa Kulu Kota	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD		0	0
11	Lanjutan Semenisasi Jl. Gunung Ore Desa Ponoragan	Panjang Semenisasi	Desa Ponoragan	80 m	200.000.000	APBD		0	0
12	Lanjutan Semenisasi Jl. Pramono Desa Ponoragan	Panjang Semenisasi	Desa Ponoragan	100 m	200.000.000	APBD		0	0
13	Pembuatan Bdan Jalan RT. 015 Desa Jonggon Desa	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon	100 m	200.000.000	APBD		0	0
14	Pembuatan Badan Jalan RT. 07 Desa Jonggon Desa	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jonggon	100 m	200.000.000	APBD		0	0
15	Pembuatan Box Culvert Jl. Bayangkara Desa Loa Kulu Kota	Jumlah Box Culvert	Desa Loa Kulu Kota	5 Unit	200.000.000	APBD		0	0
16	Perawatan Taman Kecamatan Loa Kulu	Luas Taman yang mendapat Perawatan	Desa Loa Kulu Kota	100 m2	200.000.000	APBD		0	0
17	Festival Loa Kulu Mengingat	Jumlah kegiatan Festival di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Desa Loa Kulu Kota	1 Kegiatan	200.000.000	APBD		0	0
18	Semenisasi Jalan Depan Pasar Loa Kulu	Panjang Semenisasi	Desa Loa Kulu Kota	100 m	200.000.000	APBD		0	0
19	Normalisasi Parit Besar RT. 09 Loh Sumber	Panjang Parit	Desa Loh Sumber	100 m	200.000.000	APBD		0	0
20	pembuatan badan jalan rt 8 desa sumber sari	Panjang jalan yang di bangun	Desa Sumber Sari	100 m	200.000.000	APBD		0	0
21	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Loa Kulu Kota	Jumlah Unit LPJU	Desa Loa Kulu Kota	10 Unit	200.000.000	APBD		0	0

22	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Jembayan Dalam	Jumlah Unit LPJU	Desa Jembayan Dalam	10 Unit	200.000.000	APBD		0	0
23	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Jembayan Tengah	Jumlah Unit LPJU	Desa Jembayan Tengah	10 Unit	200.000.000	APBD		0	0

**DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KECAMATAN LOA KULU APBD TAHUN 2024 (RKPD)**

					5.000.000.000				
1	Pembuatan Parit RT. 07 Ponoragan	Panjang Parit	Desa Ponoragan	70 m	175.000.000	APBD		0	0
2	Pembuatan Parit RT. 06 Ponoragan	Panjang Parit	Desa Ponoragan	70 m	175.000.000	APBD		0	0
3	Pembuatan Parit RT. 07 Desa Jonggon	Panjang Parit	Desa Jonggon	70 m	175.000.000	APBD		0	0
4	Pembuatan Parit RT. 04 Desa Jonggon	Panjang Parit	Desa Jonggon	70 m	175.000.000	APBD		0	0
5	Pembuatan WC Umum Lebolais Jembayan Dalam	Jumlah Unit WC	Desa Jembayan Dalam	2 Unit	175.000.000	APBD		0	0
6	Pembuatan TPA Rt 06 Lebolais Jembayan Dalam	Jumlah Bangunan TPA	Desa Jembayan Dalam	1 Unit	175.000.000	APBD		0	0
7	Semenisasi Gang Jumat Rt 07 Lebolais Jembayan Dalam	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Jembayan Dalam	70 m	175.000.000	APBD		0	0
8	Semenisasi Gang Bambu Rt 09 Jembayan Dalam	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Jembayan Dalam	70 m	175.000.000	APBD		0	0
9	Pembuatan Parit Beton Gg. Jahe Jembayan Tengah	Panjang Parit	Desa Jembayan Tengah	70 m	175.000.000	APBD		0	0
10	Pembangunan Saluran Drainase RT. 02 Jembayan Tengah	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Jembayan Tengah	70 m	175.000.000	APBD		0	0
11	Pengurukan Gg. Abadi RT. 03 Jembayan	Panjang Urukan	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD		0	0
12	Pengurukan Gg. Maman RT. 01 Jembayan	Panjang Urukan	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD		0	0
13	Semenisasi Gang Setia Kawan Rt 23 Jembayan	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Jembayan	70 m	175.000.000	APBD		0	0
14	Peningkatan gang Famili Rt 19 Jembayan	Panjang jalan yang di bangun	Desa Jembayan	80 m	175.000.000	APBD		0	0
15	Penurapan Gang Sumber Sari Rt 23 Jembayan	Panjang Turap yang dibangun	Desa Jembayan	90 m	175.000.000	APBD		0	0
16	Turap Sisi Jalan Loa Gagak Desa Loa Kulu Kota	Panjang Turap yang dibangun	Desa Loh Sumber	90 m	175.000.000	APBD		0	0
17	Lanjutan parit Gg. Lobang Sumur Desa Loh Sumber	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Loh Sumber	70 m	175.000.000	APBD		0	0
18	Lanjutan Parit Depan Pondok Pesantren Desa Loh Sumber	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Loh Sumber	70 m	175.000.000	APBD		0	0
19	Pengurukan Gg. Shaumil RT. 02 Ponoragan	Panjang Urukan	Desa Ponoragan	70 m	185.000.000	APBD		0	0
20	Semenisasi RT. 02 Gg. Katirin Ponoragan	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Ponoragan	70 m	185.000.000	APBD		0	0

21	Semenisasi Jalan Isnaini Desa Sepakat	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Sepakat	70 m	185.000.000	APBD		0	0
22	Pengurukan Gg. Rawa Manggis Jongkang	Panjang Urukan	Desa Jongkang	70 m	185.000.000	APBD		0	0
23	Pengurukan Jalan Jetty Jongkang	Panjang Urukan	Desa Jongkang	70 m	185.000.000	APBD		0	0
24	Pembangunan Parit Jalan Melati margahayu	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Margahayu	70 m	185.000.000	APBD		0	0
25	Pembuatan Parit Beton Jalan Semangka margahayu	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Margahayu	70 m	185.000.000	APBD		0	0
26	Semenisasi RT. 14 Desa Jonggon	Panjang Jalan yang di Semenisasi	Desa Jonggon	70 m	185.000.000	APBD		0	0
27	Pembuatan Parit Jl. Subali Desa Jonggon Jaya	Panjang Drainase yang dibangun	Desa Jonggon Jaya	70 m	185.000.000	APBD		0	0
28	Semenisasi RT. 21 Loa Gagak	Panjang Urukan	Desa Loa Kulu Kota	70 m	185.000.000	APBD		0	0

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Kecamatan Loa Kulu

Tahun : 2024

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket Pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (titik koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN, dan CSR)	Link Upload Dokumen Pendukung (Gdrive)	Disepakati/ Tidak disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/ Pengampu
1	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya penyelesaian	Kecamatan Loa Kulu	Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Loa Kulu	1 Paket	Rp 50.000.000.00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
2	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya penyelesaian	Kecamatan Loa Kulu	Lanjutan Pembangunan Taman Literasi Kecamatan Loa Kulu	1 Paket	Rp 5.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
3	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Jembatan yang ada tidak layak	Desa Sungai Payang	Pembangunan Jembatan Sentuk Desa Sungai Payang	1 Paket	Rp 15.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Jalan sudah mengalami korosi dan berlubang	Desa Loa Kulu Kota	Semenisasi Jalan Samping Polsek Loa Kulu	1 Paket	Rp 2.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
5	Pengembangan Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	Desa Sepakat	Peningkatan Jalan Rapak Nyamuk Desa Sepakat 3 Km	3 Km	Rp 5.000.000.000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

6	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Jalan semenisasi mengalami korosi dan berlubang	Desa Lung Anai	Pengaspalan jalan di dalam lingkungan Desa	L. 4 m x P. 2000 m	2.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
7	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Bangunan yg ada sdh terlalu tua	Desa Lung Anai	Pembangunan LAmin Adat yang baru	L. 40 m x P. 60 m	5.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
8	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Bangunan lama tidak layak dan perlu pemindahan	Desa Lung Anai	Pembangunan Kantor Desa yang Baru	L. 25 m x P. 30 m	2.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
9	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Penyiapan Lkasi baru Kantor Desa	Desa Lung Anai	Penimbunan Tanah Kas Desa	L. 100 m x P. 100 m	1.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
10	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum Ada Gedung Olah Raga	Desa Lung Anai	Pembangunan Gedung Badminton yang baru	L . 25 m x P. 25 m	3.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
11	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Perlu Bangunan gerbang adat	Desa Lung Anai	Pembangunan Pintu Gerbang Adat	L. 6 m x T. 6 m	1.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
12	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Perlu penurapan	Desa Lung Anai	Penurapan Tanah Kas Desa	L. 100 m x P. 100 m	1.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
13	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Perlu pembangunan baru	Desa Lung Anai	Pembangunan Amin Daduq Yang Baru	L. 30 m x P. 40 m	Rp. 500.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
14	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		BPU belum terselesaikan	RT.01 Desa Jembayan Dalam	Lanjutan pembuatan gedung BPU Desa	12 x 20	Rp1.000.000 .000,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

15	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		jalan belum tersemen	RT.04 Desa Jembayan Dalam	Semenisasi jalan Rukun Makmur	4 x 2000	Rp800.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
16	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	RT. 10, 05, 9 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Semenisasi Jalan Tudungan	5 x 4000 meter	Rp 4.500.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
17	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan yang ada dr tanah dan batu	RT. 06 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Semenisasi Jalan Tudungan Ulu	4 x 1000 meter	Rp 3.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
18	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		terjadi longsor di sisi jalan	RT. 03, 04 Dusun I Desa Jembayan Tengah	Pemasangan Bronjongan Jalan Runtuh	300 meter	Rp 2.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan umum
19	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		terdapat longsor di sisi kuburan	RT. 06 Tudungan Desa Jembayan Tengah	Turap Beton Kuburan Tudungan RT. 006	1 Paket	Rp 500.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan umum
20	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		belum terdapatnya pagar	RT. 08 Lempatan Baru Desa Jembayan Tengah	Pagar Beton Kuburan Lempatan Baru	1 Paket	Rp 500.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan umum
21	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		jalan masih struktur tanah dan berbatu	RT.013 Rempanga Desa Sungai Payang	Lanjutan Semenisasi Jalan	± 1,5 km	Rp750.000.0 00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan umum
22	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan masih tanah dan batu	Jembayan	Semenisasi Jalan menuju Dusun Ukung	5 x 5000 m	10.000.000.0 00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan umum
23	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.15 Desa Loa Kulu Kota	Semenisasi Jl. Padat Karya	3x1000 m	2.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan umum

24	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.02 - RT.03 - RT.04 - RT.05 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN AMAT KHASIM	± 3 Km	Rp 3.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
25	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.06 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN KEDONDONG	± 1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
26	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.07 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN NANAS	± 1.5 Km	Rp 1.500.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
27	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.10 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN TAMAN ARUM MENUJU DESA PONORAGAN	± 1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
28	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT.01 - RT.02 - RT.06 - RT.07 - RT.08 - RT.11 - RT.09 Desa Sumber Sari	PENINGKATAN JALAN POROS DESA SUMBER SARI (JL.R.ISMANUN/ BANGUN SARI/ TAMAN ARUM)	± 4.5 Km	Rp 4.500.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
29	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya jalan yang memadai	RT.02 - RT.04 Desa Sumber Sari	PEMBUATAN BADAN JALAN RT.02 MENUJU RT.04	± 1.5 Km	Rp 1.500.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas pekerjaan Umum
30	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 04,06,07 Desa Ponoragan	Peningkatan Jalan manunggal Desa Ponoragan	5 Km	Rp 5.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
31	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 05 Desa Ponoragan	Pengaspalan Jalan Sidodadi RT 05 Desa Ponoragan	3 Km	Rp 3.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
32	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum tersedianya jembatan yang layak	RT 02 Desa Ponoragan	Pembuatan Jembatan Jl. Pramono RT 02 Desa Ponoragan	1 Paket	Rp 700.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

33	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 02 Desa Ponoragan	Semenisasi Jl. Pramono RT 02 Desa Ponoragan	3 Km	Rp 3.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
34	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 05 Desa Ponoragan	Semenisasi Jalan Tembus RT 05 Menuju RT 01 / Jalan kuburan	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
35	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	PENINGKATAN JALAN PERTANIAN DAN JALAN ILALANG RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
36	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	SEMENISASI JL. RPAK PANJANG RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
37	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 06 Desa Ponoragan	SEMENISASI JL. ULIN RT 06 DESA PONORAGAN	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
38	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		posisi jalan masih terlalu rendah dan berair	Jalan ahmad yani RT 04 Desa Sepakat	Pengurukan dilahan galangan kapal	200m x 50m	Rp. 2.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
39	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 002 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Gang Mansur - Gang Udin"	=0,30m x 5m x 318m	Rp 715.500.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
40	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 01-RT 02 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN PASUNDAN	1300 m	Rp. 3.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
41	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 11-12 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN POROS I	1300 m	Rp. 8.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

42	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 14 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN MARGO MULYO	600 m	Rp. 800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
43	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 15 Desa Jonggon Jaya	JALAN AYAM POTONG (Pak Dedi)	500 m	Rp. 800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
44	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Kondisi jalan rawan longsor	RT 09 Desa Jonggon Jaya	PEMBUATAN TURAP BETON JALAN KUBURAN	60 m	Rp. 800.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
45	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 001 Desa Jonggon	lanjutan semenisasi jalan poros utama desa	3 km	Rp 15.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
46	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 010 Desa Jonggon	semenisasi jalan poros utama desa	5 Km	Rp 25.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
47	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT. 014 Desa Jonggon	semenisasi jalan poros utama desa	1 Km	Rp 5.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
48	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum tersedianya jembatan yang layak	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Jembatan Beton	1 Unit	Rp 15.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
49	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum tersedianya jembatan yang layak	RT. 002 Desa Jonggon	Pembangunan Jembatan Beton	1 Unit	Rp 15.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
50	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Bangunan yang ada kurang layak	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Kantor Desa	1 Unit	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum

51	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya bangunan BPU Jonggon C	RT. 002 Desa Jonggon	Pembangunan BPU Jonggon C	1 Unit	Rp 500.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
52	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 03 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN TANTAI INDAH	1500 m	Rp. 1.500.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Pekerjaan Umum
53	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya gedung Pusban	RT. 004 Desa Jonggon	Pembangunan Gedung Pusban	1 Unit	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Kesehatan
54	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya ruang terbuka hijau	Kecamatan Loa Kulu	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Loa Kulu	1 PAKET	Rp 3.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Perlu Peremajaan Alat Seni	Desa Lung Anai	Pengadaan Kelengkapan Seni Budaya	1 Kegiatan	100.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pariwisata
56	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Perlu Pendampingan	Desa Lung Anai	Pembinaan Pelatihan Seni Tari Tradisional	1 Kegiatan	Rp. 30.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pariwisata
57	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Perlu Pendampingan	Desa Lung Anai	Pembinaan dan Pelatihan Musik Tradisional	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Pariwisata
58	Pengembang an Kawasan Wisata di Pedesaan/K ecamatan		Pelestarian seni budaya Loa Kulu	Kecamatan Loa Kulu	Festival Loa Kulu Mengingat		Rp 500.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Pariwisata
59	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		kondisi lahan yang ada masih berupa lahan basah	RT. 03 Selingsing Desa Jembayan Tengah	Lanjutan Pengurukan Lahan SMP	35000 m3	Rp 875.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Pendidikan

60	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya gedung SMP	RT. 001 Desa Jonggon	Pembangunan Gedung SMPN	1 Unit	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Pendidikan
61	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya LPJU	Jonggon Desa	Penerangan Jalan Lingkungan	180 Titik	Rp 15.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Perhubunga n
62	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Perlu bangunan sarana air bersih	Desa Lung Anai	Pembuatan/ Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih	1 Kegiatan	Rp. 300.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
63	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Belum adanya sarana air bersih	Desa Jonggon	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Jonggon	1 Paket	Rp 5.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
64	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Belum ada parit pasangan	RT 01 Desa Ponoragan	Rehab Parit Jalan Harjo Sumarto Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
65	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Belum ada parit pasangan	RT 07 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan RT 07 Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
66	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Belum ada parit pasangan	RT 06 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan RT 06 Desa Ponoragan	2 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
67	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Belum ada parit pasangan	RT 07 Desa Ponoragan	Pembuatan Parit Pasangan Teluk bayur RT 07 Desa Ponoragan	1 Km	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim

68	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 004 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Swadaya Etam"	= 4m x 300m x 0,30m	Rp 540.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
69	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 005 Desa Jongkang	(Lanjutan) Pelebaran Semenisasi Jalan "Husein"	=2,5m x 800m x 0,30m	Rp 900.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
70	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 007 Desa Jongkang	Semenisasi Jalan "Beringin Jaya"	= 5m x 670m x 0,30m	Rp 1.507.500.00 0,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
71	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	Rt. 007 Dusun Kebunsari Desa Margahayu	Lanjutan Semenisasi Jalan Poros II RT. 007	300 Meter	Rp 500.000.000, 00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
72	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 07 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN BRONTOSENO	300 m	Rp. 650.000.000		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
73	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		Struktur jalan masih tanah dan berbatu	RT 08 Desa Jonggon Jaya	PENINGKATAN JALAN HANOMAN	1.100 m	Rp. 1.000.000.00 0		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
74	Pengembang an Kawasan Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Pedesaan/K ecamatan		Belum ada parit pasangan	RT. 004 Desa Jonggon	Pembuatan Parit Beton	1Km	Rp 12.000.000.0 00,00		APBD		Disepakati	Dinas Perkim
75	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		lahan yang ada masih rendah dan sering terdampak banjir	RT. 11 Lempatan Baru Desa Jembayan Tengah	Pengurukan Lapangan Bola	1 Paket	Rp 1.000.000.00 0,00		APBD		Disepakati	Dispora
76	Pengembang an Layanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah		belum tersedianya lapangan volley	RT.014 Desa Sungai Payang	Pembangunan Lapangan Volly	1 PAKET	Rp150.000.0 00		APBD		Disepakati	Dispora

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Loa Kulu Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Kulu.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Loa Kulu.

Demikian pula dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Akhir SKPD Tahun 2024 Kecamatan Loa Kulu ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Loa Kulu, 2 Agustus 2023
Camat Loa Kulu



H. ADRIANSYAH.SH

Pembina

NIP. 196810061986031006